

MANAJEMEN IMPLEMENTASI LAYANAN ADVOKASI BIMBINGAN KONSELING DI PONDOK PESANTREN MODERN AL FURQON BANJARMASIN

Rusliana¹, Husnul Madihah², Jarkawi³

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

²Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

³Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

ABSTRACT

This research is about the Implementation Management of Guidance Counseling Advocacy Services at Modern Islamic Boarding School Al Furqon Banjarmasin.

The purpose of this study was to find out the management of the implementation of guidance and counseling advocacy services at the modern Islamic boarding school Al Furqon Banjarmasin. The research approach used is descriptive qualitative with research subjects including school principals, teacher guidance, and students. Collecting data using observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that the management of the implementation of counseling advocacy services at the Al Furqon Banjarmasin modern Islamic boarding school is carried out in the following stages: (1) Planning; (2) Organizing; (3) Service implementation; (4) Assessment/evaluation; (5) Follow-up language in labour. The role of the counseling teacher is involved in the entire advocacy service process by planning program services, then providing assistance before providing services, organizing service elements and facilities, implementing service delivery, conducting evaluations, developing follow-up strategies and preparing reports for all services. The evaluation is carried out by evaluating the stages in the advocacy service so that it can be used as material for consideration in making adjustments to the service process. The follow-up strategy in the management of the implementation of advocacy services is by utilizing the results of the evaluation and then from this analysis then preparing an activity plan then compiling a work plan. the difficulties experienced by teachers in managing the implementation of advocacy counseling services are the lack of information provided by students regarding matters needed in solving client problems, the unavailability of evaluation tools for program implementation, the problem is that I am a student, minwa Limited hours of study require management time to compile, implement, assess, analyze and follow up.

Keywords: *Management, implementation, advocacy.*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang Manajemen Implementasi Layanan Advokasi Bimbingan Konseling Di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di pondok pesantren modern Al Furqon Banjarmasin.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru bimbingan konseling, dan siswa. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di pondok pesantren modern Al Furqon Banjarmasin dilakukan dengan tahapan: (1)Perencanaan; (2)Pengorganisasian; (3)Pelaksanaan layanan; (4)Penilaian/evaluasi; (5)Tindak lanjut dan laporan. Peran serta guru BK adalah terlibat dalam seluruh proses layanan advokasi dengan merencanakan program layanan, kemudian melakukan identifikasi sebelum memberikan layanan, melakukan pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan, melaksanakan pemberian layanan, melakukan evaluasi, menyusun strategi tindak lanjut dan menyusun laporan akhir keseluruhan layanan. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi tahapan-tahapan dalam layanan advokasi agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian proses pelayanan. Strategi tindak lanjut dalam manajemen implementasi layanan advokasi yakni dengan memanfaatkan hasil evaluasi dan kemudian dari analisis tersebut kemudian disusun rencana kegiatan tidak lanjut selanjutnya menyusun laporan. Kesulitan yang dialami oleh guru dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling adalah minimnya informasi yang diberikan peserta didik terkait hal-hal yang

diperlukan dalam penyelesaian masalah klien, belum tersedianya alat-alat instrumen evaluasi pelaksanaan program, belum banyak siswa yang meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya, keterbatasan jam pelajaran dan perlu manajemen waktu untuk menyusun, melaksanakan, menilai, menganalisis dan melakukan tindak lanjut..

Kata kunci: Manajemen, implementasi, advokasi.

PENDAHULUAN

Sebagai yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut Kadir (2012), pendidikan dalam arti luas bermakna hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu (Mudiyahardjo, 2002).

Definisi pendidikan secara keseluruhan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat (Kadir, 2012)

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, sengaja, dan terarah (Kadir, 2007). Mulai dari pendidikan tingkat kanak-kanak (TK), tingkat dasar (SD/MI), tingkat menengah (SMP/MTS, SMA/MA/SMK) sampai dengan tingkat perguruan tinggi (PT). Agar semua kegiatan yang ada disekolah berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan bisa tercapai maka diperlukan adanya sebuah manajemen atau pengaturan dan pengelolaan sebuah lembaga yang biasa disebut dengan manajemen pendidikan.

Manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha kerjasama anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sehingga, dalam konteks pendidikan manajemen diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Robbin dan Coulter, 2007).

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian Balitbang-dikbudmenunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan pembenahan manajemen sekolah, di samping peningkatan kualitas guru dan pengembangan sumber belajar (Mulyasa, 2007)

Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan (sekolah) akan sangat bergantung kepada manajemen komponen-komponen pelaksanaan kegiatan seperti manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen peserta didik, manajemen pembiayaan, manajemen tenaga pelaksana, dan manajemen sarana prasarana. Komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan (sekolah), artinya bahwa satu komponen tidak lebih penting dari komponen lainnya. Akan tetapi satu komponen memberikan dukungan bagi komponen lainnya sehingga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan lembaga pendidikan (sekolah) tersebut.

Manajemen sekolah memiliki garapan sebagai berikut: (1) manajemen kurikulum (2) manajemen kesiswaan (3) manajemen personil/anggota (4) manajemen sarana dan prasarana (5) manajemen keuangan (6) manajemen hubungan sekolah dan masyarakat (7) manajemen layanan khusus/bimbingan konseling (Rohiyat, 2010).

Komponen manajemen kurikulum, kesiswaan, personil/anggota, sarana dan prasarana, dan keuangan merupakan komponen manajemen dasar yang harus dimiliki oleh sekolah. Sedangkan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan manajemen Bimbingan Konseling merupakan komponen manajemen penyempurna manajemen pendidikan. Akan tetapi walaupun hanya sebagai komponen penyempurna manajemen humas dan khususnya manajemen layanan bimbingan juga merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian khusus di lembaga-lembaga pendidikan. Terlebih bagi lembaga/sekolah yang menginginkan dan merencanakan lembaga/sekolahnya bisa mengungguli lembaga/sekolah lain (Qomar, 2006).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2019).

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan (Mulyasa, 2013). Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004).

Layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji (Prayitno, 2014).

Salah satu fungsi konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Dalam hal ini seorang advokat dinilai seorang advokat lebih unggul dibanding dengan profesi yang lain. Advokasi juga didefinisikan sebagai aksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang berfungsi untuk mengubah kebijakan.

Menurut Prayitno, dkk (2014), layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji.

Sekolah dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sama atau melebihi harapan dari siswa, orang tua, guru dan karyawan serta masyarakat. Siswa puas dengan layanan sekolah. Misalnya, puas dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru maupun pimpinan, fasilitas yang disediakan sekolah, dan puas menikmati situasi sekolah. Orang tua pun puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua. Misalnya, puas karena menerima laporan tentang perkembangan siswa maupun program-program sekolah. Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah. Dan masyarakat puas karena menerima lulusan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan, karena pemberian kepuasan kepada siswa, orang tua siswa dan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari prinsip manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan (Umiarso dan Gojali, 2010).

Lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. (Bafadhol, 2017)

Berbicara masalah kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan sangat banyak faktor yang berperan, dimulai dari dukungan kebijakan makro pemerintah, kebijakan mikro kepala sekolah, pengelolaan pendidikan, sarana prasarana, kualitas input dan yang paling berperan adalah bagaimana kualitas guru sebagai agent perubahan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan mencapai tujuan. (Sari dan Jarkawi, 2022)

Pentingnya keterlibatan-keterlibatan eksternal siswa, orang tua, guru dan karyawan serta masyarakat disekolah bukan hanya pada sekolah yang berstatus swasta, akan tetapi juga berstatus negeri. Hanya saja dilapangan terdapat indikasi bahwa keterlibatan masyarakat khususnya eksternal siswa, orang tua, guru dan karyawan serta masyarakat dalam pendidikan lebih banyak dilakukan oleh madrasah swasta, karena tanpa dukungan serta partisipasi mereka, madrasah swasta akan sulit bertahan dan berada ditengah-tengah masyarakat (Syafarudin dan Irwan Nasution, 2003).

Pada abad 21 guru dituntut memiliki profesi yang professional, yakni guru yang tidak hanya menjadi alat untuk mentransmisi budaya dan pengetahuan, tetapi harus mampu mentransformasikan nilai-nilai budaya ke dalam ilmu pengetahuan supaya memiliki daya saing tinggi dan mempunyai arah serta kualitas yang baik., (Aqylah dan Jarkawi, 2022)

Dari penjelasan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Manajemen Implementasi layanan advokasi Bimbingan Konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin. Objek penelitian yang dilakukan penulis adalah SMK Farmasi Al Furqon, Madrasah Aliah Al Furqon , Mts M.3 Al Furqon dan Madrasah Ibtidaiyah Al Furqon Kota Banjarmasin. Dari hasil observasi sementara SMK Farmasi Al Furqon pada tahun 2019 terakreditasi “A” dengan nilai 91, Madrasah Aliah Al Furqon pada tahun 2019 terakreditasi “B” dengan nilai 87, MTs M.3 Al Furqon pada tahun 2019 terakreditasi “A” dengan nilai 96, dan Madrasah Ibtidaiyah Al Furqon pada tahun 2019 terakreditasi “A” dengan nilai 92. Hal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan melihat usia SMK Farmasi Al Furqon, Madrasah Aliah Al Furqon , Mts M.3 Al Furqon dan Madrasah Ibtidaiyah Al Furqon Kota Banjarmasin ini yang relatif masih muda bila dibandingkan dengan sekolah lain yang ada di Banjarmasin. Jumlah santri dan santriwati di SMK Farmasi Al Furqon, Madrasah Aliah Muhammadiyah 2 Al Furqon, MTs Muhammadiyah 3 Al Furqon, dan MI Muhammadiyah 3 Al Furqon Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun ini terus mengalami peningkatan. Hal ini diindikasikan salah satunya adalah karena layanan lembaga pendidikan yang diberikan oleh sekolah ini bisa menghasilkan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Permendikbud No 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah mengatur salah satunya mengenai penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling. Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling tersebut tertuang dalam 22 jenis kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling yang meliputi layanan langsung, layanan tidak langsung, layanan administrasi, dan tugas tambahan Bimbingan dan Konseling. 22 jenis kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling tersebut di antaranya: konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan ahli lain, kolaborasi dengan lembaga lain, konferensi kasus, kunjungan rumah (home visit), layanan advokasi, pengelolaan papan bimbingan, pengelolaan kotak masalah, pengelolaan leaflet, pengembangan media Bimbingan dan Konseling, kegiatan tambahan, melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen kebutuhan, menyusun dan melaporkan program kerja, membuat evaluasi, serta melaksanakan administrasi dan manajemen Bimbingan dan Konseling.

Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan pertolongan agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman dirinya sehingga individu mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekitarnya dengan baik maupun di keluarga, sekolah dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari definisi dan jenis layanan bimbingan dan konseling tersebut yang telah dikemukakan. Namun kenyataannya tidak semua guru BK saat ini menggunakan semua layanan bimbingan konseling dengan baik dan efektif. Guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang memiliki tugas pokok memberikan bantuan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik atau individu. Guru Bimbingan dan Konseling sebaiknya memiliki pemahaman, keterbukaan, serta respon yang positif dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan ke-22 kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling. Namun pada kenyataannya, harapan-harapan ideal tersebut belum terlaksana sepenuhnya oleh para guru Bimbingan dan Konseling di lapangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru-guru Bimbingan dan Konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin didapatkan hasil bahwa: (1) Penyelenggaraan kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling belum sepenuhnya memenuhi apa yang tertuang dalam kebijakan di atas; (2) Layanan yang diberikan tidak sepenuhnya lengkap diberikan seperti layanan bimbingan di luar kelas yang berjumlah 22 layanan tidak sepenuhnya tersedia berdasarkan hasil rangkuman dari 4 sekolah tersebut, seperti pengelolaan media informasi yang meliputi website dan/atau leaflet dan/atau papan bimbingan dan konseling, Pengelolaan papan Bimbingan, pengelolaan kotak masalah yang tidak tersedia di sekolah; (3) Ada beberapa program yang dibuat oleh Guru Bimbingan dan Konseling di Pondok Pesantren Al Furqon, akan tetapi masih banyak siswa yang merasakan bahwa diantara program tersebut penerapannya masih kurang; (4) Ada guru BK yang tidak paham mengenai layanan advokasi tersebut sehingga tidak digunakan dalam proses bimbingan dan konseling,

Hal ini tentulah berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling

yang tidak dapat berjalan dengan maksimal. Akan tetapi guru Bimbingan dan Konseling berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada cukup untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagipemahaman atau informasi mengenai dunia profesi Bimbingan dan Konseling, yang terpenting adalah kembali lagi kepada situasi dan kondisi di lapangan. Salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling adalah layanan advokasi yang membantu siswa untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan. Layanan ini seharusnya dapat diterapkan oleh konselor atau guru BK untuk menangani berbagai kondisi tentang ketidaksesuaian hak siswa terkait dengan pihak lain yang berwewenang atas dikembalikannya hak siswa yang dimaksud, hal ini dapat dilihat dari konsep dasar layanan advokasi dalam BK. Namun kenyataannya ada guru BK yang tidak paham mengenai layanan advokasi tersebut sehingga tidak digunakan dalam proses bimbingan dan konseling,

Dari hal-hal di atas, dapat dilihat kesenjangan antara harapan yang ideal mengenai sikap guru Bimbingan dan Konseling. Kesenjangan inilah yang kemudian dapat memberikan dampak kurangnya layanan yang maksimal bagi perkembangan optimal para peserta didik. Selain itu, hal-hal tersebut dapat menghambat perkembangan keprofesian Bimbingan dan Konseling di tanah air. Oleh karenanya sangat penting untuk diketahui bagaimana persepsi guru-guru Bimbingan dan Konseling tersebut terhadap penyelenggaraan kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan Permendikbud No 111 tahun 2014 mengenai Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah agar pemahaman terhadap persepsi guru-guru Bimbingan dan Konseling ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggaraan kegiatan layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas, serta evaluasi bagi kebijakan ini. Atas dasar itulah peneliti ingin meneliti “Manajemen Implementasi layanan advokasi Bimbingan Konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin.

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah berupa: (a) manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin; (b) peran guru BK dalam manajemen implementasi layanan advokasi Bimbingan Konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin; (c) evaluasi guru BK dalam implementasi layanan advokasi di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin; (d) strategi guru BK dalam menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi layanan advokasi di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/pengambilan kesimpulan. Kemudian uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(1) Manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin.

Manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin dilakukan dengan beberapa tahapan, tahapan atau proses tersebut dimulai dari: (1) Perencanaan: dilakukan dengan merencanakan program layanan bersama-sama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan Guru Bimbingan Konseling. Kemudian melakukan identifikasi klien beserta masalah dan kondisi awal, materi dasar yang dijadikan rujukan dan pengembangan dalam hubungannya dengan pihak-pihak terkait.; (2) Pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan: mengorganisasikan segenap unsur materi dan sarana, pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan; (3) Pelaksanaan layanan: dilakukan dengan memberikan layanan kepada peserta didik yang memerukan layanan tersebut, dalam pelaksanaan advokasi kepada peserta didik yang memerlukan layanan ini ada yang melakukannya dengan format kolaboratif yakni bekerja sama dengan

berbagai pihak dan strategi lain yakni membangun suasana BMB3 (berfikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab) demi terpecahkannya permasalahan klien dan diperolehnya solusi yang terbaik dengan berkomunikasi dan melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Pada perilaku membolos peserta didik dilakukan seperti peserta didik yang berperan sebagai klien, guru mata pelajaran yang mana peserta didik sering membolos, atau mungkin orang tua juga, wali kelas, dan waka yang bersangkutan, dan pihak lain apabila diperlukan. Kemudian untuk bullying yang diterima oleh peserta didik, pihak yang terkait adalah seperti klien, kemudian rekan-rekannya yang melakukan bullying, guru kelas atau wali kelas peserta didik, dan pihak lain apabila diperlukan agar peserta didik memperoleh haknya kembali; (4) Penilaian/evaluasi: untuk menilai hasil dan proses layanan yang dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan, seberapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan secara penuh kepada klien; (5) tahap terakhir adalah tindak lanjut dan laporan, untuk tindak lanjut dilakukan sesuai dengan sesuai dengan hasil penilaian pada setiap tahap layanan serta menyusun laporan akhir keseluruhan layanan. Pelaksanaan manajemen tersebut sudah sesuai dengan operasional layanan advokasi (layanan ADVO) seperti yang diungkapkan oleh Prayitno (2012)

Pelaksanaan manajemen tersebut sudah sesuai dengan operasional layanan advokasi (layanan ADVO) seperti yang diungkapkan oleh Prayitno (2012), bahwa dalam pelaksanaan layanan akan lebih memakan pemikiran, upaya dan kerjasama semua pihak agar tercapai hasil yang optimal. Operasional dalam layanan advokasi yaitu: 1) perencanaan, SATLAN layanan ADVO, selain berisi identifikasi klien secara lengkap beserta masalah dan kondisi awal dirinya, juga secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangannya dalam hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Rencana layanan ini juga membuka keyakinan diselenggarakannya berbagai “sub-layanan” sebagaimana dikemukakan di atas untuk mengoptimalkan proses dan hasil; 2) pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan, setelah rencana yang bersifat terbuka dan komprehensif dipersiapkan, sebelum layanan ADVO secara nyata diwujudkan di lapangan terlebih dahulu diatur dan diorganisasikan segenap unsur materi dan sarana, pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan. Pengaturan dan organisasi seperti itu setiap kali disesuaikan dan dibangun kembali sesuai dengan kemajuan, hasil, dan keperluan objektif pada tahap kemajuan layanan. Selanjutnya, 3) pelaksanaan layanan, rencana dan sarana awalnya yang telah disipkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran dan keberhasilan layanan. Selama layanan berlangsung pengorganisasian dan pengaturan kembali segala sesuatunya dapat dilakukan. Kemudian, 4) penilaian, penilaian terhadap hasil dan proses layanan dilakukan sesuai dengan tahap- tahap pelaksanaan. Penilaian ini bersifat progresif tahap demi tahap sampai dengan penilaian akhir. Penilaian diorientasikan pada sampai berapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan ADVO dapat dikembalikan secara penuh kepada klien. Yang terakhir, 5) tindak lanjut dan laporan, tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demikian pula laporan yang dibuat, dapat dibuat berupa laporan per tahap kegiatan dan/atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan, sesuai dengan keperluannya.

(2) Peran serta guru BK dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin

Dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin, guru BK terlibat dalam seluruh proses layanan advokasi dalam bimbingan konseling di pondok pesantren modern Al Furqon Banjarmasin dengan merencanakan program layanan advokasi, kemudian melakukan identifikasi klien beserta masalah dan kondisi awal, materi dasar yang dijadikan rujukan dan pengembangan dalam hubungannya dengan pihak-pihak terkait sebelum memberikan layanan agar langkah yang dilakukan dalam pemberian layanan sesuai. Selanjutnya guru Bimbingan dan Konseling melakukan pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan: mengorganisasikan segenap unsur materi dan sarana, pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan. Setelah itu barulah guru melaksanakan pemberian layanan: dilakukan dengan memberikan layanan kepada peserta didik yang memerukan layanan tersebut, dalam pelaksanaan advokasi kepada peserta didik yang memerlukan layanan ini ada yang melakukannya dengan format kolaboratif yakni bekerja sama dengan berbagai pihak dan strategi lain yakni membangun suasana BMB3 (berfikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab) demi terpecahkannya permasalahan klien

dan diperolehnya solusi yang terbaik dengan berkomunikasi dan melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Layanan advokasi yang diberikan kepada peserta didik yang menerima perlakuan bullying dan peserta didik yang berperilaku membolos. Kemudian setelah layanan advokasi selesai diberikan, guru Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan dan layanan yang diberikan, apakah layanan yang diberikan telah berhasil mengembalikan hak-hak peserta didik yang tidak diperhatikan dan atau hak peserta didik yang tercederai berhasil dikembalikan, dan setelah melaksanakan evaluasi, guru Bimbingan dan Konseling kemudian dari hasil evaluasi tersebut dilakukan tindak lanjut dengan menyusun strategi tindak lanjut layanan yang diberikan. Kegiatan tindak lanjut ini sebagai upaya untuk menuntaskan bantuan, perbaikan, sebagai kesinambungan program dan/atau pengembangan program layanan advokasi yang berikutnya. Serta menyusun laporan akhir keseluruhan layanan.

Peran guru Bimbingan Konseling di pondok pesantren modern Al Furqon Banjarmasin tersebut sesuai dengan peran guru Bimbingan dan Konseling serta konselor sebagaimana dalam (Anwar, dkk, 2018), bahwa peran tersebut antara lain: a). Menyusun program bimbingan dan konseling bersama kepala sekolah; (b). Bertanggung jawab terhadap jalannya program; (c). Memberikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah; (d). Menerima dan mengklasifikasikan informasi pendidikan; (e). Menganalisis dan menafsirkan data siswa f. Menyenggarakan pertemuan staf; (g). Melaksanakan bimbingan kelompok dan konseling individual; (h). Menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling; (i). Melakukan studi kelayakan; (j). Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran; (k). Memberikan informasi kepada siswa; (l) Meneliti kesulitan dan kemajuan siswa; dan (m). Mengadakan hubungan dengan orang tua siswa.

Dan juga peran komponen konselor dalam layanan advokasi sebagaimana menurut Syafuro yaitu sebagai individu yang melaksanakan layanan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, melakukan lobi dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait serta dapat mengolah kondisi dan materi secara optimal. Adapun dalam memberikan pelayanan terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dengan pihak-pihak terkait maka konselor harus memiliki WPKNS (wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap) yang luas (Ifdil, dkk., 2022).

(3) Evaluasi guru BK dalam implementasi layanan advokasi di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin.

Evaluasi yang dilakukan dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin yakni dilakukan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam layanan advokasi. Evaluasi menjadi umpan balik secara berkesinambungan bagi semua tahap pelaksanaan program. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik untuk perbaikan maupun pengembangan program di masa yang akan datang. Evaluasi juga dimaksudkan untuk menguji keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi mempunyai fungsi untuk menentukan layak tidaknya suatu program. Evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan prestasi yang dicapai. Evaluasi dalam layanan advokasi di pondok pesantren modern Al Furqon Banjarmasin dimulai dari melakukan evaluasi terhadap tahapan perencanaan untuk melihat apakah perencanaan yang dilakukan telah mampu mendukung pelaksanaan layanan dengan tepat; kemudian melakukan evaluasi terhadap tahapan pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan untuk mengetahui penyiapan unsur materi dan sarana, serta aspek terkait operasional lainnya telah terorganisasi rapi dan mendukung kelancaran pelaksanaan layanan; kemudian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan, apakah strategi pelaksanaan pemberian layanan telah digunakan dan bermanfaat dengan tepat, dan apakah layanan yang diberikan kepada peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan klien dan seberapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan secara penuh kepada klien. Pada evaluasi yang telah dilakukan tersebut, apabila ada hal-hal yang ternyata dirasa kurang baik atau kurang kemudian diperbaiki untuk program berikutnya dengan melaksanakan tindak lanjut dengan menyusun strategi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dalam pelaksanaan program dilakukan dengan tujuan agar dapat menilai apakah program layanan advokasi yang dilaksanakan yang merupakan objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana, kemudian mengukur apakah pelaksanaan layanan advokasi yang diberikan sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari program layanan advokasi dan melakukan pengembangan program layanan yang diberikan dan untuk mengetahui aspek-aspek lain apakah yang

perlu dimasukkan kedalam program bimbingan untuk perbaikan layanan yang diberikan, serta menilai apakah layanan advokasi yang diberikan dapat memberikan sumbangan program bimbingan terhadap program pendidikan secara keseluruhan di sekolah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan tersebut sesuai dengan konsep evaluasi menurut Widoyoko (2012), evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.

Dengan dilakukan evaluasi secara komprehensif, jelas dan cermat maka akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik/konseli sebagai sasaran layanan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya di diskripsikan dan di analisa dan disusun dalam bentuk laporan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban guru BK dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di madrasah. Disamping itu, laporan ini juga sangat membantu sebagai umpan balik penyusunan program selanjutnya. (Direktorat GTK Madrasah, 2020)

Serta evaluasi dan penilaian terhadap layanan advokasi yang dilakukan sesuai dengan pendapat dari Tolley & Rowland (Anwar, dkk. (2018), yang mengemukakan bahwa evaluasi terhadap efektivitas program bimbingan dan konseling dapat dilihat dari tiga indikator, yakni proses, hasil jangka menengah, dan hasil akhir.

(4) Strategi guru BK dalam menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi layanan advokasi di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin

Strategi tindak lanjut dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin yakni dilakukan dilaksanakan dengan memanfaatkan hasil evaluasi dan kemudian dari analisis tersebut kemudian disusun rencana kegiatan tindak lanjut misalnya menentukan aspek – aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan, mengembangkan pelayanan agar pelayanan BK lebih optimal, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan, mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan BK lebih optimal, membuat desain ulang atau merevisi seluruh program, atau beberapa dari program yang dianggap belum efektif, mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan peminatan peserta didik selanjutnya, memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan peminatan peserta didik selanjutnya menyampaikan dan membuat pelaporan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling di pondok pesantren modern Al Furqon Banjarmasin yang dilakukan setelah melakukan evaluasi sesuai dengan pendapat dari Sugiyo dan Amin (2019), bahwa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah evaluasi dan penilaian terhadap program BK adalah tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian tersebut, dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan, sebagai bagian tahap akhir dari kegiatan evaluasi dan dapat digunakan oleh para guru pembimbing/konselor sekolah untuk melakukan langkah perbaikan, penghentian layanan, dan pengembangan program pada tahun mendatang, atau menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan program, mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan BK lebih optimal, melakukan referal siswa yang memerlukan bantuan khusus dari terapis lain, pengembangan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan BK selanjutnya. Kemudian tujuan kegiatan tindak lanjut pelaporan hasil program BK adalah untuk memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektifitas program BK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, pengolahan data, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- (1) Manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin dilakukan dengan beberapa tahapan, tahapan atau proses tersebut dimulai dari:

- (1) Perencanaan; (2) Pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan; (3) Pelaksanaan layanan; (4) Penilaian/evaluasi; (5) tindak lanjut dan laporan.
- (2) Peran serta guru BK dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin adalah terlibat dalam seluruh proses layanan advokasi dalam bimbingan konseling di pondok pesantren modern Al Furqon Banjarmasin dengan merencanakan program layanan advokasi, kemudian melakukan identifikasi sebelum memberikan layanan, melakukan pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan, melaksanakan pemberian layanan, melakukan evaluasi, menyusun strategi tindak lanjut dan menyusun laporan akhir keseluruhan layanan.
- (3) Evaluasi yang dilakukan dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin dengan mengevaluasi tahapan-tahapan dalam layanan advokasi agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian proses pelayanan.
- (4) Strategi tindak lanjut dalam manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin yakni dengan memanfaatkan hasil evaluasi dan kemudian dari analisis tersebut kemudian disusun rencana kegiatan tindak lanjut selanjutnya menyusun laporan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran yang berkaitan dengan manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin sebagai berikut:

- (1) Bagi pihak yayasan, madrasah dan sekolah diharapkan selalu mendukung kegiatan layanan bimbingan dan konseling dengan memfasilitasi seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- (2) Bagi guru bimbingan dan konseling sebaiknya lebih meningkatkan kualitas berbagai layanan yang diberikan dalam bimbingan dan konseling agar program-program berjalan dengan baik.
- (3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya memberikan informasi mengenai manajemen implementasi layanan advokasi bimbingan konseling di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas mengenai manajemen implementasi layanan bimbingan konseling yang lain di Pondok Pesantren Modern Al Furqon Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, dkk. (2018). Strategy Accountability Program Bimbingan dan Konseling Dalam Mewujudkan Public Trust Di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Banjarmasin. Bandung: Penerbit ALFABETA
- Aqylah, N & Jarkawi. (2022). PENTINGNYA KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PADA ABAD 21. PROCEEDING STUDIUM GENERALE 2021 ISBN : 978-632-7583-84-4. 54-58. Diakses dari: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/6696>
- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2008). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Widoyoko, S. E. P. (2012). EVALUASI PROGRAM PELATIHAN (Training Program Evaluation). Diakses dari: http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_IPA/197102041997021-NAHADI/Evaluasi%2520Program%2520Pelatihan.pdf
- Bafadhol, I. (2017). LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 06 No.11, Januari 2017, (59-72)
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. (2020). MODUL PEMBELAJARAN 4 EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Ifdil, dkk., (2011) Layanan Advokasi dalam Bimbingan dan Konseling. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia).Vol 6, No. 2, 2022. (706-711)
- Jarkawi. (2015). PROFESI GURU BIMBINGAN dan KONSELING DI ERA GLOBALISASI BERBASIS PENELITIAN. JBKR. Jurnal Bimbingan & Konseling Ar-Rahman. (VOLUME 1, NOMOR 1 TAHUN 2015), 1-15. Diakses dari: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/BKA/article/view/370>
- Kadir, A., dkk. (2012). Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mudiyahardjo, R. (2002). Pengantar Pendidikan. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muniarti. (2015). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Universitas Katolik
- Prayitno, P., dkk. (2014). *Pembelajaran melalui pelayanan BK di satuan pendidikan*. Jakarta: FIP UNP.
- Qomar, M. (2006). *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Robbin dan Coulter. (2007). *Manajemen (edisi kedelapan)*, Jakarta: Indeks
- Rohiyat. (2010). *Manajemen Sekolah*. Bandung: PT refika Aditama
- Sari, D. R. & Jarkawi. (2022). KREATIVITAS GURU DALAM PENDIDIKAN. PROCEEDING STUDIUM GENERALE 2021 ISBN : 978-632-7583-84-4. 59-64. Diakses dari: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/6697>
- Sugiyo & Amin, N. Z. (2019). *Modul 3 Perencanaan dan Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Toporek, R. L. (1999). *Developing a Common Language and Framework for Understanding Advocacy in Counseling*: University of North Carolina.
- Umiarso & Gojali, I. (2010). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta : IRCISoD.
- Usman, H. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.